



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan Pasal 35, Pasal 56, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dalam Peraturan Daerah dimaksud, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya termasuk rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan oleh jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (2) Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Apabila reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Apabila Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperoleh dengan cara :
$$\text{NSR} = \text{Nilai Strategis} \times \text{satuan media reklame} \times \text{jangka waktu} \times \text{Harga Satuan Reklame}$$
- (6) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan cara :
$$\text{NS} = (\text{Bobot Kawasan Jalan} \times \text{Skor Kawasan Jalan}) + (\text{Bobot Sudut Pandang} \times \text{Skor Sudut Pandang}) + (\text{Bobot Ketinggian} \times \text{Skor Ketinggian})$$
- (7) Perhitungan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (8) Kawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (9) Satuan Media Reklame dan Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (10) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah lamanya penyelenggaraan reklame antara lain harian, bulanan dan tahunan.

Pasal 3

Reklame papan nama yang memuat sponsor dihitung sebagai reklame produk rokok atau non rokok.

BAB III
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air (NPA) diperoleh dengan cara mengalikan volume penggunaan air dengan harga dasar air.
- (3) Harga dasar air diperoleh dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan harga air baku
- (4) Faktor nilai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh 2 (dua) komponen, yaitu:
 - a. komponen sumber daya alam dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - b. komponen kompensasi dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (5) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air; dan
 - c. kualitas air.
- (6) Bobot komponen sumber daya alam sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

- (7) Komponen kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
- komponen kompensasi peruntukan yang ditentukan oleh faktor tujuan dan volume pengambilan;
 - komponen kompensasi pemulihan ditentukan oleh faktor tingkat kerusakan lingkungan.
- (8) Bobot komponen kompensasi peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (9) Bobot komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b termuat dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (10) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 2.000 /m³.
- (11) Jenis sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah jenis air yang dimanfaatkan oleh wajib pajak, yang meliputi:
- sumber air tanah dangkal, yaitu air yang berasal dari sumber air tanah dangkal < 40 m;
 - sumber air tanah dalam, yaitu air yang berasal dari sumber air tanah dalam ≥ 40 m;
 - mata air.
- (12) Lokasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah lokasi sumber air yang dimanfaatkan oleh wajib pajak berdasarkan kawasan yang terdiri dari 2 (dua) yaitu :
- kawasan yang berada pada zona jaringan perusahaan air minum;
 - kawasan yang berada di luar zona jaringan perusahaan air minum.
- (13) Kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah kualitas air yang diambil/dimanfaatkan oleh wajib pajak yang digolongkan dalam:
- baik, yaitu air yang diambil dari mata air dengan kedalaman < 80m;
 - cukup baik, yaitu air yang diambil dari mata air dengan kedalaman ≥ 80m.
- (14) Tujuan pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas :
- Non niaga, termasuk di dalamnya:
 - instansi / lembaga / kantor Pemerintah;
 - instansi / lembaga / kantor TNI / POLRI;
 - sarana instalasi pemerintah;
 - Kolam renang umum milik pemerintah;
 - asrama pemerintah;
 - perguruan tinggi negeri / swasta / akademik.
 - Niaga kecil, termasuk di dalamnya:
 - usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 - usaha kecil / losmen / pemondokan (kos-kosan);
 - rumah makan / restoran kecil;
 - rumah sakit swasta / poliklinik / laboratorium / praktik dokter;
 - laundry;
 - toko / kios / warung;
 - salon kecantikan / panti pijat / mandi uap / pangkas rambut;
 - bimbingan tes / kursus keterampilan / biro jasa.
 - Industri kecil, termasuk di dalamnya:
 - industry rumah tangga kecil seperti : industry tekstil / batik, industry minuman es, industri;
 - peternakan;
 - hotel bintang 1, 2, dan 3;
 - rusun sederhana;
 - pengrajin / sanggar seni lukis;
 - industry bahan kimia / obat-obatan;

7. furniture;
 8. jenis usaha kecil lainnya yang sejenis.
- d. Niaga besar, termasuk di dalamnya:
1. hotel bintang 4 dan 5;
 2. apartemen;
 3. bank (kantor pusat dan cabang);
 4. night club / bar / cafe / restoran besar;
 5. bengkel besar;
 6. tempat pencucian mobil;
 7. kolam renang;
 8. real estate.
- e. Industry besar, termasuk di dalamnya:
1. pabrik es skala besar;
 2. gudang pendingin;
 3. pabrik / industri tekstil skala besar;
 4. pabrik baja;
 5. pabrik / industri gula/ susu/ kulit.
- (15) Volume pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan kategori sebagai berikut:
- a. 0 – 50 m³ per bulan;
 - b. > 50 m³ – 500 m³ per bulan;
 - c. > 500 m³ – 1000 m³ per bulan;
 - d. > 1000 m³ – 2500 m³ per bulan;
 - e. > 2500 m³ – 5000 m³ per bulan;
 - f. > 5000 m³ per bulan.
- (16) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
- a. air tanah telah mengalami penurunan permukaan dan/atau mengalami pencemaran air tanah;
 - b. air tanah belum mengalami penurunan permukaan dan/atau belum mengalami pencemaran air tanah.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota adalah :
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet;

BAB V
TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan :
 - a. laporan hasil penjualan dan pemakaian nota penjualan;
 - b. nota penjualan;
 - c. bukti pembayaran lainnya kepada pengusaha.
- (3) SPTPD dari Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Parkir disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (4) SPTPD dari Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Air Tanah, Wajib Pajak Sarang Burung Walet, dan Wajib Pajak Penerangan Jalan, disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir.
- (5) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Pajak Reklame, SPTPD diisi dan disampaikan ke Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebelum penyelenggaraan reklame;
 - b. Pajak Hiburan insidental, SPTPD diisi dan disampaikan ke Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah Hiburan insidental selesai.
- (6) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk diserahkan ke Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan sedangkan yang lainnya untuk Wajib Pajak.
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pembayaran.
- (8) SPTPD yang tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan telah diberi surat peringatan/surat teguran dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) tidak dipenuhi sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak.
- (10) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk dan isi SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Bagian Kedua

Syarat syarat serta Tata cara Pembayaran Angsuran dan atau Penundaan

Pasal 10

- (1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan atau penundaan :
 - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas;
 - b. Permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia;

- c. Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
 - d. Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
- (2) Tata cara pembayaran secara angsuran dan atau penundaan :
- a. Wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran dan atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan;
 - b. Surat Perjanjian Angsuran dan atau penundaan pembayaran ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/disetujui oleh DPDPK;
 - c. Pembayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan untuk penundaan pembayaran paling lama 4 (empat) bulan;
 - d. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (3) Bentuk dan isian Perjanjian angsuran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak dalam hal pembayaran angsuran dan atau penundaan pembayaran adalah Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran.
- (3) Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Walikota dapat memberikan pengurangan pajak terutang terhadap Pajak Hiburan dan Pajak Reklame dalam hal untuk kepentingan sosial, ibadah, ilmu pengetahuan, budaya dan dalam rangka pembinaan di bidang olah raga dan mendukung program pemerintah.
- (2) Atas permohonan wajib pajak berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu, Walikota dapat memberikan pengurangan pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet dan SKPD Pajak Air Tanah.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan pajak, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif yang terutang disertai dengan alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Walikota.
- (2) Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo.
- (3) Setelah menerima permohonan permintaan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif yang terutang, petugas pertimbangan keberatan mengadakan penelitian kepada Wajib Pajak dan membuat laporan hasil penelitian kembali kepada Kepala Dinas.

- (4) Kepala Dinas setelah menerima laporan hasil penelitian kembali, melaporkan kepada Walikota dengan pertimbangan permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif dapat dikabulkan atau ditolak .
- (5) Walikota berhak untuk menolak atau menerima permohonan untuk pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak .
- (6) Surat keputusan mengabulkan atau menolak atas permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif yang terutang ditanda tangani oleh Walikota dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat keputusan dikabulkan atau ditolak, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Kepala Dinas untuk besaran pajak terutang sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota Yogyakarta/Kepala dinas dengan melampirkan fotocopy bukti setoran pajak yang telah dibayarkan/SSPD untuk masa pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran
- (2) Kepala Dinas menugaskan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Berdasar SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Dinas memberitahukan kepada wajib pajak bahwa kelebihan pembayaran pajak sudah dapat diambil.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) DPDPK melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD; dan
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

- (3) Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari :
 - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;
 - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan penelitian di lapangan dan dibuatkan berita acara penelitian serta hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pejabat menyusun daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian di lapangan dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Penelitian lapangan dilakukan oleh DPDPK terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan b, berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c.
- (4) Penelitian lapangan atau penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, dan untuk penelitian lapangan harus dilakukan dengan surat perintah dari Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Penelitian administrasi atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan per Wajib Pajak, per tahun pajak, dan per jenis ketetapan.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dan d Peraturan ini

Pasal 18

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administrasi dituangkan dalam daftar wajib pajak dan besaran piutang pajak yang akan dilakukan penghapusan
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar wajib pajak dan besaran piutang pajak yang akan dilakukan penghapusan piutang pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan daftar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menerbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak
- (4) Penghapusan sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet di bawah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (5) Bentuk dan isi formulir pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini

Pasal 20

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan.

Pasal 21

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. pemeriksa harus memiliki dan memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan;
 - b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - d. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
 - e. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak daerah dengan hasil pemeriksaan;
 - f. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - g. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
 - h. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa;
 - b. pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor Wajib Pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat;
 - c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu;
 - d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan;

- e. hasil Pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- f. terhadap temuan dalam Pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan akhir Hasil Pemeriksaan;
- g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan, diterbitkan SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

Pemberian dan pemanfaatan insentif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2011
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 51

NILAI STRATEGIS (NS)

A. REKLAME BALIHO/BILLBOARD/NEON BOX/NEON SIGN/WALL DYNAMIC/ TRIVISION/BANDO JALAN/MEGATRON/VIDEOTRON

| No. | Kawasan | Bobot | Skor | Indeks | Muka | Bobot | Skor | Indeks | Tinggi | Bobot | Skor | Indeks | NS |
|-----|---------|-------|------|--------|--------|-------|------|--------|------------|-------|------|--------|------|
| 1 | A | 50% | 14 | 7 | 4 Sisi | 40% | 40 | 16 | > 8 | 10% | 15 | 1,5 | 24,5 |
| | | 50% | 14 | 7 | | 40% | 40 | 16 | > 4 s.d. 8 | 10% | 10 | 1 | 24 |
| | | 50% | 14 | 7 | | 40% | 40 | 16 | 0 s.d. 4 | 10% | 5 | 0,5 | 23,5 |
| | | 50% | 14 | 7 | 3 Sisi | 40% | 30 | 12 | > 8 | 10% | 15 | 1,5 | 20,5 |
| | | 50% | 14 | 7 | | 40% | 30 | 12 | > 4 s.d. 8 | 10% | 10 | 1 | 20 |
| | | 50% | 14 | 7 | | 40% | 30 | 12 | 0 s.d. 4 | 10% | 5 | 0,5 | 19,5 |
| | | 50% | 14 | 7 | 2 Sisi | 40% | 20 | 8 | > 8 | 10% | 15 | 1,5 | 16,5 |
| | | 50% | 14 | 7 | | 40% | 20 | 8 | > 4 s.d. 8 | 10% | 10 | 1 | 16 |
| | | 50% | 14 | 7 | | 40% | 20 | 8 | 0 s.d. 4 | 10% | 5 | 0,5 | 15,5 |
| | | 50% | 14 | 7 | 1 Sisi | 40% | 10 | 4 | > 8 | 10% | 15 | 1,5 | 12,5 |
| | | 50% | 14 | 7 | | 40% | 10 | 4 | > 4 s.d. 8 | 10% | 10 | 1 | 12 |
| | | 50% | 14 | 7 | | 40% | 10 | 4 | 0 s.d. 4 | 10% | 5 | 0,5 | 11,5 |
| 2 | B | 50% | 12 | 6 | 4 Sisi | 40% | 40 | 16 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 23,5 |
| | | 50% | 12 | 6 | | 40% | 40 | 16 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 23 |
| | | 50% | 12 | 6 | | 40% | 40 | 16 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 22,5 |
| | | 50% | 12 | 6 | 3 Sisi | 40% | 30 | 12 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 19,5 |
| | | 50% | 12 | 6 | | 40% | 30 | 12 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 19 |
| | | 50% | 12 | 6 | | 40% | 30 | 12 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 18,5 |
| | | 50% | 12 | 6 | 2 Sisi | 40% | 20 | 8 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 15,5 |
| | | 50% | 12 | 6 | | 40% | 20 | 8 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 15 |
| | | 50% | 12 | 6 | | 40% | 20 | 8 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 14,5 |
| | | 50% | 12 | 6 | 1 Sisi | 40% | 10 | 4 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 11,5 |
| | | 50% | 12 | 6 | | 40% | 10 | 4 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 11 |
| | | 50% | 12 | 6 | | 40% | 10 | 4 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 10,5 |
| 3 | C | 50% | 10 | 5 | 4 Sisi | 40% | 40 | 16 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 22,5 |
| | | 50% | 10 | 5 | | 40% | 40 | 16 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 22 |
| | | 50% | 10 | 5 | | 40% | 40 | 16 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 21,5 |
| | | 50% | 10 | 5 | 3 Sisi | 40% | 30 | 12 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 18,5 |
| | | 50% | 10 | 5 | | 40% | 30 | 12 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 18 |
| | | 50% | 10 | 5 | | 40% | 30 | 12 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 17,5 |
| | | 50% | 10 | 5 | 2 Sisi | 40% | 20 | 8 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 14,5 |
| | | 50% | 10 | 5 | | 40% | 20 | 8 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 14 |
| | | 50% | 10 | 5 | | 40% | 20 | 8 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 13,5 |
| | | 50% | 10 | 5 | 1 Sisi | 40% | 10 | 4 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 10,5 |
| | | 50% | 10 | 5 | | 40% | 10 | 4 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 10 |
| | | 50% | 10 | 5 | | 40% | 10 | 4 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 9,5 |

B. REKLAME KAIN/PLASTIK (UMBUL-UMBUL/SPANDUK/VERTIKAL BANNER DAN SEJENISNYA)

| No. | Kawasan | Bobot | Skor | Indeks | Muka | Bobot | Skor | Indeks | Tinggi | Bobot | Skor | Indeks | NS |
|-----|---------|-------|------|--------|--------|-------|------|--------|------------|-------|------|--------|-----|
| 1. | A | 50% | 4 | 2,0 | 2 Sisi | 40% | 3 | 1,2 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 3.7 |
| | | 50% | 4 | 2,0 | | 40% | 3 | 1,2 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 3.6 |
| | | 50% | 4 | 2,0 | | 40% | 3 | 1,2 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 3.5 |
| | | 50% | 4 | 2,0 | 1 Sisi | 40% | 2 | 0,8 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 3.3 |
| | | 50% | 4 | 2,0 | | 40% | 2 | 0,8 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 3.2 |
| | | 50% | 4 | 2,0 | | 40% | 2 | 0,8 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 3.1 |
| | | 50% | 4 | 2,0 | | 40% | 2 | 0,8 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 3.1 |
| 2. | B | 50% | 3 | 1,5 | 2 Sisi | 40% | 3 | 1,2 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 3.2 |
| | | 50% | 3 | 1,5 | | 40% | 3 | 1,2 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 3.1 |
| | | 50% | 3 | 1,5 | | 40% | 3 | 1,2 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 3 |
| | | 50% | 3 | 1,5 | 1 Sisi | 40% | 2 | 0,8 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 2.8 |
| | | 50% | 3 | 1,5 | | 40% | 2 | 0,8 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 2.7 |
| | | 50% | 3 | 1,5 | | 40% | 2 | 0,8 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 2.6 |
| | | 50% | 3 | 1,5 | | 40% | 2 | 0,8 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 2.6 |
| 3. | C | 50% | 2 | 1 | 2 Sisi | 40% | 3 | 1,2 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 2,7 |
| | | 50% | 2 | 1 | | 40% | 3 | 1,2 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 2,6 |
| | | 50% | 2 | 1 | | 40% | 3 | 1,2 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 2,5 |
| | | 50% | 2 | 1 | 1 Sisi | 40% | 2 | 0,8 | > 8 | 10% | 5 | 0,5 | 2,3 |
| | | 50% | 2 | 1 | | 40% | 2 | 0,8 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0,4 | 2,2 |
| | | 50% | 2 | 1 | | 40% | 2 | 0,8 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 2,1 |
| | | 50% | 2 | 1 | | 40% | 2 | 0,8 | 0 s.d. 4 | 10% | 3 | 0,3 | 2,1 |

C. REKLAME JENIS SELEBARAN/ MELEKAT/ STIKER/ BERJALAN/ UDARA/ SUARA/ PERAGAAN/ FILM/ SLIDE/ APUNG

| No. | Jenis | NS | Keterangan |
|-----|----------------|-----|-------------------------|
| 1 | Selebaran | 3.4 | s.d. 100 lembar 1 kali |
| 2 | Melekat/stiker | 3.4 | s.d. 100 lembar 1 kali |
| 3 | Berjalan | 2.5 | 1 meter persegi 1 tahun |
| 4 | Udara | 4.5 | 1 buah 30 hari |
| 5 | Suara | 2.5 | 1 suara 1 hari |
| 6 | Peragaan | 4 | 1 peragaan 1 hari |
| 7 | Film/slide | 2.5 | 1 film/slide 1 hari |
| 8 | Apung | 4 | 1 apung 1 hari |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

TABEL PEMBAGIAN KAWASAN JALAN DI KOTA YOGYAKARTA

| NO | NAMA JALAN | | |
|----|--|-----|---------------------------|
| | KAWASAN A | | |
| 1. | JL. ABU BAKAR ALI BARAT (S.D SIMPANG JL A. JAJULI) | 8. | JL. MAGELANG |
| 2. | JL. JENDERAL AHMAD YANI | 9. | JL. MALIOBORO |
| 3. | JL. BRIGJEN KATAMSO | 10. | JL. P. DIPONEGORO |
| 4. | JL. CIK DI TIRO | 11. | JL. P. MANGKUBUMI |
| 5. | JL. JEND SUDIRMAN | 12. | JL. P. SENOPATI |
| 6. | JL. KLERINGAN | 13. | JL. TRIKORA |
| 7. | JL. LAKSDA ADI SUCIPTO | 14. | JL. LETJEN URIP SUMOHARJO |
| | KAWASAN B | | |
| 1 | JL. ABU BAKAR ALI TIMUR | 35 | JL. KEMASAN |
| 2 | JL. ALUN-ALUN SELATAN | 36 | JL. KENARI |
| 3 | JL. ALUN-ALUN UTARA | 37 | JL. KUSBINI |
| 4 | JL. AM SANGAJI | 38 | JL. KOL SUGIYONO |
| 5 | JL. ATMOSUKARTO | 39 | JL. KOMPOL B. SUPRAPTO |
| 6 | JL. BANTUL | 40 | JL. KYAI MOJO |
| 7 | JL. BAUSASRAN | 41 | JL. KUSUMANEGARA |
| 8 | JL. BAYANGKARA | 42 | JL. LEMPUYANGAN |
| 9 | JL. BUGISAN | 43 | JL. LETJEND SUPRAPTO |
| 10 | JL. C. SIMANJUNTAK | 44 | JL. LINGKAR SELATAN |
| 11 | JL. CENDANA | 45 | JL. MATARAM |
| 12 | JL. DAGEN | 46 | JL. MAYJEND SUTOYO |
| 13 | JL. D.I. PANJAITAN | 47 | JL. MAYOR SURYOTOMO |
| 14 | JL. DR. SARJITO | 48 | JL. MENTERI SUPENO |
| 15 | JL. DR. SUTOMO | 49 | JL. NGASEM |
| 16 | JL. DR. WAHIDIN S. HUSODO | 50 | JL. NGEKSIGONDO |
| 17 | JL. GADING | 51 | JL. PARANGTRITIS |
| 18 | JL. GADJAHMADA | 52 | JL. PASAR KEMBANG |
| 19 | JL. GAYAM | 53 | JL. PEMBELA TANAH AIR |
| 20 | JL. GEDONGKUNING | 54 | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN |
| 21 | JL. GEJAYAN | 55 | JL. PERWAKILAN |
| 22 | JL. GLAGAH SARI | 56 | JL. PRAMUKA |
| 23 | JL. GONDOSULI | 57 | JL. PROF YOHANES |
| 24 | JL. HAYAM WURUK | 58 | JL. RE MARTADINATA |

| | | | |
|----|---|----|---------------------|
| 25 | JL. HOS COKROAMINOTO UTARA | 59 | JL. SUGENG JERONI |
| 26 | JL. HOS COKROAMINOTO SLTN | 60 | JL. SUROTO |
| 27 | JL. IBU RUSWO | 61 | JL. SULTAN AGUNG |
| 28 | JL. IMOIRI | 62 | JL. TAMAN SISWA |
| 29 | JL. IPDA TUT HARSONO | 63 | JL. TENTARA PELAJAR |
| 30 | JL. JLAGRAN | 64 | JL. TERBAN |
| 31 | JL. JOGONEGARAN | 65 | JL. VETERAN |
| 32 | JL. KH. A DAHLAN | 66 | JL. WAKHID HASYIM |
| 33 | JL. KAPTEN TENDEAN | 67 | JL. WIROBRAJAN |
| 34 | JL. KAUMAN | 68 | JL. YOS SUDARSO |
| | KAWASAN C | | |
| | RUAS JALAN DI KOTA YOGYAKARTA SELAIN RUAS JALAN DI KAWASAN A DAN B. | | |
| | | | |

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

SATUAN MEDIA REKLAME DAN HARGA SATUAN REKLAME

| NO | JENIS | JANGKA WAKTU | UKURAN | HARGA | |
|----|---------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | |
| 1 | a. Megatron/videotron | 1 tahun | M2 | a. Rokok | Rp. 5,000,000,- |
| | | | | b. Non Rokok | Rp. 1,500,000,- |
| | | | | c. Nama Usaha | Rp. 375,000,- |
| | b. Bando jalan | 1 tahun | M2 | a. Rokok | Rp. 1,250,000,- |
| | | | | b. Non Rokok | Rp. 375,000,- |
| | | | | c. Nama Usaha | Rp. 93,750,- |
| | c. Dynamic wall/trivison | 1 tahun | M2 | a. Rokok | Rp. 750,000,- |
| | | | | b. Non Rokok | Rp. 225,000,- |
| | | | | c. Nama Usaha | Rp. 56,250,- |
| | d. Neon box/neon sign | 1 tahun | M2 | a. Rokok | Rp. 500,000,- |
| | | | | b. Non Rokok | Rp. 150,000,- |
| | | | | c. Nama Usaha | Rp. 37,500,- |
| | e. Billboard tanpa cahaya | 1 tahun | M2 | a. Rokok | Rp. 400,000,- |
| | | | | b. Non Rokok | Rp. 120,000,- |
| | | | | c. Nama Usaha | Rp. 30,000,- |
| | f. Baliho | 1 bulan | M2 | a. Rokok | Rp. 30,000,- |
| | | | | b. Non Rokok | Rp. 9,000,- |
| | | | | c. Nama Usaha | Rp. 2,250,- |
| 2 | Kain/plastik/mika | 1 hari | M2 | a. Rokok | Rp. 5,000,- |
| | | | | b. Non Rokok | Rp. 4,000,- |
| | | | | c. Nama Usaha | Rp. 2,500,- |
| | b. Umbul-umbul | 1 hari | M2 | a. Rokok | Rp. 5,000,- |
| | | | | b. Non Rokok | Rp. 4,000,- |
| | | | | c. Nama Usaha | Rp. 2,500,- |
| 3 | Selebaran | 1 kali | Per 100 lembar | | Rp. 2,500,- |
| 4 | Melekat/stiker | 1 kali | Per 100 lembar | | Rp. 25,000,- |
| 5 | Berjalan | 1 tahun | M2 | | Rp. 250,000,- |
| 6 | Udara | 1 hari | Per buah | | Rp. 25,000,- |
| 7 | Suara | 1 hari | Per buah | | Rp. 6,000,- |
| 8 | Peragaan | 1 hari | Per buah | | Rp. 100,000,- |
| 9 | Film/slide | 1 hari | Per buah | | Rp. 200,000,- |
| 10 | Apung | 1 hari | Per buah | | Rp. 25,000,- |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM
(JENIS, LOKASI, DAN KUALITAS AIR)

| NO. | KRITERIA | BOBOT |
|-----|--|-------|
| 1. | Air tanah dangkal, kualitas baik, ada jaringan PDAM/Sumber alternatif | 1.0 |
| 2. | Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/Sumber alternatif | 0.9 |
| 3. | Air tanah dangkal, kualitas baik, diluar jaringan PDAM/Sumber alternatif | 0.8 |
| 4. | Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, diluar jaringan PDAM/Sumber alternatif | 0.7 |
| 5. | Air tanah dalam, kualitas baik, ada jaringan PDAM/Sumber alternatif | 0.6 |
| 6. | Air tanah dalam, kualitas baik, diluar jaringan PDAM/Sumber alternatif | 0.5 |
| 7. | Air tanah dalam, kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/Sumber alternatif | 0.4 |
| 8. | Air tanah dalam, kualitas cukup baik, diluar jaringan PDAM/Sumber alternatif | 0.3 |
| 9. | Mata air ada jaringan PDAM/Sumber alternatif | 0.2 |
| 10. | Mata air diluar jaringan PDAM/Sumber alternatif | 0.1 |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 51 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 Juni 2011

**BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI PERUNTUKAN
(TUJUAN & VOLUME PENGAMBILAN)**

| NO | SUBYEK | 0 - 50 M ³ | >50 - 500 M ³ | >500 - 1000 M ³ | >1000 - 2500 M ³ | >2500 - 5000 M ³ | >5000 M ³ |
|----|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | PEMAKAI | PER BULAN | PER BULAN | PER BULAN | PER BULAN | PER BULAN | PER BULAN |
| 1 | Non Niaga | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 2 | Niaga Kecil | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 |
| 3 | Industri Kecil | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 4 | Niaga Besar | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| 5 | Industri Besar | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 51 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 Juni 2011

**BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN
(TINGKAT KERUSAKAN AIR TANAH)**

| KRITERIA | BOBOT |
|--|-------|
| Air tanah telah mengalami penurunan muka air tanah dan atau pencemaran air tanah | 1,0 |
| Air tanah belum mengalami penurunan muka air tanah dan atau pencemaran air tanah | 0.5 |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd


H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 51 TAHUN 2011
 TANGGAL : 30 Juni 2011

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

A - SPTPD PAJAK HOTEL

A. 1 - BLANGKO

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835 | SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL | Nomor : |
| | | Masa Pajak : |
| | | Tanggal diterima DPDPK |

PERHATIAN :

- Baca Petunjuk pengisian
- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran
- Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan atau sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku

A. NPWPD :

B. NAMA WAJIB PAJAK :

C. NAMA USAHA :

D. ALAMAT TEMPAT USAHA :

E. KELURAHAN / KECAMATAN :

F. TELEPHONE :

G. PERUBAHAN IDENTITAS : ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)

| H. DASAR PENGENAAN PAJAK | OMZET PENJUALAN | JUMLAH |
|--------------------------|------------------------|----------|
| | 1. Kamar Hotel | Rp. |
| | 2. Fasilitas Penunjang | Rp. |
| | 3. Kamar Kos | Rp. |
| | Jumlah total | Rp. |

I. PAJAK TERUTANG Tarif Pajak 10 % (sepuluh persen) Rp.

J. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN Rp.

K. YANG HARUS DIBAYAR (lajur huruf I – huruf J) Rp.

L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK / KUASANYA
 Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya
 Yogyakarta,
 (.....)

M. PEMBETULAN IDENTITAS :

1. NPWPD :

2. NAMA WAJIB PAJAK :

3. NAMA USAHA :

4. ALAMAT TEMPAT USAHA :

5. KELURAHAN / KECAMATAN :

6. TELEPHONE :


PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :

- Kolom A : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
- Kolom B : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
- Kolom C : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
- Kolom D : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
- Kolom E : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
- Kolom F : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
- Kolom G : Diisikan apabila ada perubahan data Wajib Pajak dan dilampiri surat pernyataan perubahan identitas
- Kolom H : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan
- Kolom I : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10 % (sepuluh persen)
- Kolom J : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
- Kolom K : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak
- Kolom L : Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- Kolom M : Diisikan apabila ada perubahan

No SPTPD :


TANDA TERIMA
 NPWPD :
 NAMA :
 USAHA :
 ALAMAT USAHA :
 Yogyakarta,
 Yang Menerima

A. 2 - LAMPIRAN BLANGKO

|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK HOTEL</p> | <p>Nomor :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun :</p> <p style="text-align: center;">Tanggal diterima DPDPK</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------|-------------|--|--|-----------|-------------|--|--|---------------------|-------------|--|--------|------------------------|-------------|--|--|-----------------|-------------|--|--|------------------------|-------------|--|--|---------------------|-------------|--------|--|------------------|-------------|--|--|-----------|-------------|--|--------|--|--|--|
| | <p>1 DATA OBYEK PAJAK</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>A. GOLONGAN HOTEL <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> (Isikan sesuai nomor)</p> <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:50%;">01 Bintang Lima</td> <td style="width:50%;">06 Melati Tiga</td> </tr> <tr> <td>02 Bintang Empat</td> <td>07 Melati Dua</td> </tr> <tr> <td>03 Bintang Tiga</td> <td>08 Melati Satu</td> </tr> <tr> <td>04 Bintang Dua</td> <td>09 Lainnya</td> </tr> <tr> <td>05 Bintang Satu</td> <td></td> </tr> </table> | | | 01 Bintang Lima | 06 Melati Tiga | 02 Bintang Empat | 07 Melati Dua | 03 Bintang Tiga | 08 Melati Satu | 04 Bintang Dua | 09 Lainnya | 05 Bintang Satu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Bintang Lima | 06 Melati Tiga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Bintang Empat | 07 Melati Dua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 Bintang Tiga | 08 Melati Satu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Bintang Dua | 09 Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Bintang Satu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>B. KLASIFIKASI KAMAR /TARIF/ JUMLAH</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">No.</th> <th style="width:20%;">Klas Kamar</th> <th style="width:10%;">Jumlah</th> <th style="width:10%;">Tarif</th> <th style="width:10%;">Discount</th> <th style="width:15%;">Jumlah Kamar terjual</th> <th style="width:10%;">Omzet (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">Extra Bed</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Klas Kamar | Jumlah | Tarif | Discount | Jumlah Kamar terjual | Omzet (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extra Bed | | | | | | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
| No. | Klas Kamar | Jumlah | Tarif | Discount | Jumlah Kamar terjual | Omzet (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Extra Bed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>C. KOS-KOS</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">Jumlah Kamar</th> <th style="width:20%;">Tarif sewa (Rp.)</th> <th style="width:20%;">Jumlah Kamar Laku</th> <th style="width:20%;">Omset (Rp.)</th> <th style="width:20%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | Jumlah Kamar | Tarif sewa (Rp.) | Jumlah Kamar Laku | Omset (Rp.) | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Kamar | Tarif sewa (Rp.) | Jumlah Kamar Laku | Omset (Rp.) | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>D. FASILITAS PENUNJANG</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">No</th> <th style="width:35%;">Jenis Fasilitas yang disediakan</th> <th style="width:30%;">Keterangan</th> <th style="width:30%;">Omzet penjualan (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>Telephone / Faximille / Teleks</td> <td>Ada / Tidak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Internet</td> <td>Ada / Tidak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Foto Copy</td> <td>Ada / Tidak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Loundry dan Washing</td> <td>Ada / Tidak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Jasa perjalanan wisata</td> <td>Ada / Tidak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Food & Baverage</td> <td>Ada / Tidak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Ruangan yang disewakan</td> <td>Ada / Tidak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Fasilitas Olah Raga</td> <td>Ada / Tidak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Fasiltas Hiburan</td> <td>Ada / Tidak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Lain-lain</td> <td>Ada / Tidak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | No | Jenis Fasilitas yang disediakan | Keterangan | Omzet penjualan (Rp.) | | Telephone / Faximille / Teleks | Ada / Tidak | | | Internet | Ada / Tidak | | | Foto Copy | Ada / Tidak | | | Loundry dan Washing | Ada / Tidak | | | Jasa perjalanan wisata | Ada / Tidak | | | Food & Baverage | Ada / Tidak | | | Ruangan yang disewakan | Ada / Tidak | | | Fasilitas Olah Raga | Ada / Tidak | | | Fasiltas Hiburan | Ada / Tidak | | | Lain-lain | Ada / Tidak | | Jumlah | | | |
| No | Jenis Fasilitas yang disediakan | Keterangan | Omzet penjualan (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Telephone / Faximille / Teleks | Ada / Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Internet | Ada / Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy | Ada / Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Loundry dan Washing | Ada / Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jasa perjalanan wisata | Ada / Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Food & Baverage | Ada / Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ruangan yang disewakan | Ada / Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitas Olah Raga | Ada / Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasiltas Hiburan | Ada / Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lain-lain | Ada / Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. LAMPIRAN LAPORAN PENJUALAN DAN SEJENIS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dilampirkan tersendiri sebagai satu kesatuan dari lampiran ini


B. SPTPD PAJAK RESTORAN
B. 1 - BLANGKO

| | | |
|---|---|--|
|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK RESTORAN</p> | <p>Nomor :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun :</p> <p>Tanggal diterima DPDPK </p> |
| <p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baca Petunjuk pengisian 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan atau sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku | | |
| <p>A. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | | |
| B. NAMA WAJIB PAJAK : | | |
| C. NAMA USAHA : | | |
| D. ALAMAT TEMPAT USAHA : | | |
| E. KELURAHAN / KECAMATAN : | | |
| F. TELEPHONE : | | |
| G. PERUBAHAN IDENTITAS : ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu) | | |
| <p>H. DASAR PENGENAAN PAJAK</p> <p>(Coret yang tidak perlu)</p> | <p>OMZET PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN</p> | <p>JUMLAH (Rp)</p> |
| | 1. Disantap di tempat | : |
| | 2. Dibawa pulang | : |
| | 3. Diantar ke konsumen | : |
| | 4. Katering/Jasa Boga | : |
| | Jumlah total | : |
| I. PAJAK TERUTANG | Tarif Pajak 10 % (sepuluh persen) | |
| J. KREDIT PAJAK | | |
| K. YANG HARUS DIBAYAR | (lajur huruf I – huruf J) | |
| L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK / KUASANYA | Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya | Yogyakarta , (.....) |
| M. PEMBETULAN IDENTITAS : | | |
| 1. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| 2. NAMA WAJIB PAJAK : | | |
| 3. NAMA USAHA : | | |
| 4. ALAMAT TEMPAT USAHA : | | |
| 5. KELURAHAN / KECAMATAN : | | |
| 6. TELEPHONE : | | |
| <p>PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :</p> <p>Kolom A : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom B : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom C : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom D : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom E : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom F : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom G : Diisikan apabila ada perubahan data Wajib Pajak dan dilampiri surat pernyataan perubahan identitas</p> <p>Kolom H : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan</p> <p>Kolom I : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10 % (sepuluh persen)</p> <p>Kolom J : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir</p> <p>Kolom K : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak</p> <p>Kolom L : Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya</p> <p>Kolom M : Diisikan apabila ada perubahan</p> | | |
| No SPTPD : | | |
| TANDA TERIMA | | |
| NPWPD : | | |
| NAMA : | | |
| USAHA : | | |
| ALAMAT USAHA : | | |
| | Yogyakarta, | |
| | Yang Menerima | |

B. 2 - LAMPIRAN BLANGKO

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|------------|------------------------|------------|
|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN</p> | <p>Nomor : Masa Pajak : Tahun :</p> <p style="text-align: center;">Tanggal diterima DPDPK </p> | | | | |
| 1 DATA OBYEK PAJAK | | | | | | |
| a. Jumlah meja dan kursi | : Meja : dan Kursi : | | | | | |
| b. Menggunakan mesin Kas Register | : Ya / Tidak | | | | | |
| c. Menggunakan Nota / Bill | : Ya / Tidak | | | | | |
| 1. Apabila " Ya " , Nota / Bill yang digunakan (coret yang tidak perlu) | : a. Nota / Bill dari Pemerintah Kota b. Nota / Bill sendiri , diperporasikan ke DPDPK c. Nota sendiri tanpa perporasi | | | | | |
| e. Menyediakan jasa pengiriman makanan | : Ya / Tidak | | | | | |
| 2. DATA OBYEK PAJAK | | | | | | |
| No. | Makanan | Minuman | Keterangan | | | |
| | Jenis makanan Tarif | Jenis makanan Tarif | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. REKAPITULASI OMZET PENDAPATAN | | | | | | |
| Bulan | Disantap ditempat | | Diantar ke konsumen | | Dibawa pulang konsumen | |
| | Jumlah Konsumen | Omset (Rp) | Jumlah Konsumen | Omset (Rp) | Jumlah Konsumen | Omset (Rp) |
| | | | | | | |
| 4. OMSET PENJUALAN CATERING/JASA BOGA | | | | | | |
| BULAN | JUMLAH PESANAN | OMSET PENJUALAN | | | | |
| | | | | | | |
| Yogyakarta , | | | | | | |
| (.....) | | | | | | |

C. SPTPD PAJAK HIBURAN

| | | |
|---|--|--|
|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK HIBURAN</p> | Nomor : Masa Pajak : Tahun : |
| | | Tanggal diterima DPDPK |

PERHATIAN:

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK
- Beri Nomor pada kotak ↑ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Jl. Kenari No. 56, Komplek Balaikota, Timoho, Yogyakarta 55165, paling lambat pada tanggal
- Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

| | | |
|--------------------------|---|---|
| A. NPWPD | : | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| B. NAMA WAJIB PAJAK | : | |
| C. NAMA USAHA | : | |
| D. ALAMAT TEMPAT USAHA | : | |
| E. KELURAHAN / KECAMATAN | : | |
| F. TELEPHONE | : | |
| G. PERUBAHAN IDENTITAS | : | ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu) |

A. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN

| | | | |
|---|----------|--|--|
| 1. Hiburan yang diselenggarakan (dilingkari yang sesuai) | | | |
| a. Tontonan film b. pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari, dan/atau busana; c. pagelaran kesenian tradisional; d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; e. pameran; f. diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya; g. karaoke; h. sirkus, akrobat dan sulap; i. permainan bilyard, golf, bowling; j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor; k. permainan ketangkasan; l. panti pijat/massage, refleksi dan mandi uap/spa; m. pertandingan olah raga; n. pusat kebugaran (fitnes center) | | | |
| 2. Harga Tanda Masuk yang berlaku | | | |
| - Kelas..... | Rp. | | |
| - Kelas..... | Rp. | | |
| - Kelas..... | Rp. | | |
| 3. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa : kali Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur / Minggu : kali | | | |
| 4. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa : orang Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur : orang Jumlah pengunjung pada waktu pertunjukan insidental : orang | | | |
| 5. Jumlah meja / mesin : buah dengan koin/kartu elektronik dan sejenisnya Harga koin : Rp..... Harga kartu elektronik Rp..... (khusus untuk Bilyard dan Permainan Ketangkasan) | | | |
| 6. Jumlah jalur bola bowling/ lubang golf :jalur / lubang Tarif pemakaian : Rp..... per permainan | | | |
| 7. Jumlah kamar / ruangan : Buah dengan Sewa Kamar / jasa Rp..... (khusus untuk Panti Pijat, Mandi Uap, Karaoke) | | | |
| 8. Iuran anggota/ sewa penggunaan fasilitas fitnes : Rp...../bulan atau Rp...../hari | | | |
| 9. Penjualan karcis dengan mesin tiket : 1. Ya 2. Tidak | | | |
| 10. Melaksanakan pembukuan / pencatatan : 1. Ya 2. Tidak | | | |

B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - a. Masa Pajak : Tanggal s/d Tanggal
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah) :
 - d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :
 - a. Masa Pajak : Tanggal s/d Tanggal
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah) :
 - d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
Wajib Pajak

.....

Nama jelas

D. KOLOM PENELITIAN OLEH PETUGAS DPDPK

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP. :

(.....)

----- - Gunting disini -----

No. SPTPD :


TANDA TERIMA

N P W P D :
Nama :
Alamat :

....., Tahun
Yang Menerima

(.....)

D. SPTPD PAJAK REKLAME

| | | |
|---|--|---|
|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK REKLAME</p> | <p>Nomor :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun :</p> |
| | <p>Tanggal diterima DPDPK</p> | |

PERHATIAN:

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK
2. Beri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Jl. Kenari No. 56, Komplek Balaikota, Timoho, Yogyakarta 55165, paling lambat 1 (satu) minggu untuk reklame permanen dan 2 (dua) hari untuk reklame insidental sebelum Reklame diselenggarakan
4. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan

| | |
|--------------------------|---|
| A. NPWPD | : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| B. NAMA WAJIB PAJAK | : |
| C. NAMA USAHA | : |
| D. ALAMAT TEMPAT USAHA | : |
| E. KELURAHAN / KECAMATAN | : |
| F. TELEPHONE | : |
| G. PERUBAHAN IDENTITAS | : ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu) |

A. DATA OBJEK PAJAK

| No | Nilai Strategis | Ukuran | Jenis | Jumlah | Batas / Jangka Waktu |
|----|--|-------------------------------------|---|--------|-----------------------|
| 1. | a. Lokasi pemasangan Jalan b. Tinggi bidang teratasmeter c. Kondisi bidang (di tanah (Negara / menjorok tanah Negara ≥ 50% / persil orang*) | P =...m L = ..m Muka =...sisi | a. Jenis..... b. Judul..... c. Naskah (Rokok / Non Rokok / Nama Usaha / Profesi*) | | s/d |
| 2. | a. Lokasi pemasangan Jalan b. Tinggi bidang teratas.....meter c. Kondisi bidang (di tanah (Negara / menjorok tanah Negara ≥ 50% / persil orang*) | P =...m L = ..m Muka =...sisi | a. Jenis..... b. Judul..... c. Naskah (Rokok / Non Rokok / Nama Usaha / Profesi*) | | s/d |
| 3. | a. Lokasi pemasangan Jalan b. Tinggi bidang teratas meter c. Kondisi bidang (di tanah (Negara / menjorok tanah Negara ≥ 50% / persil orang*) | P =...m L = ..m Muka =...sisi | a. Jenis..... b. Judul..... c. Naskah (Rokok / Non Rokok / Nama Usaha / Profesi*) | | s/d |
| 4. | a. Lokasi pemasangan Jalan b. Tinggi bidang teratas meter c. Kondisi bidang (di tanah (Negara / menjorok tanah Negara ≥ 50% / persil orang*) | P =...m L = ..m Muka =...sisi | a. Jenis..... b. Judul..... c. Naskah (Rokok / Non Rokok / Nama Usaha / Profesi*) | | s/d |

Keterangan :

Ukuran : P = Panjang L = Lebar T = Tinggi

*) *coret yang tidak perlu

Jenis Reklame

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Billboard < 12 m2; | 7. Neon box/neon sign | 13. Berjalan |
| 2. Billboard 12 s.d < 24 m2 | 8. Spanduk | 14. Udara |
| 3. Billboard ≥ 24 m2 | 9. Umbul-umbul | 15. Suara |
| 4. Megatron/videotron | 10. Baliho | 16. Peragaan |
| 5. Dynamic wall/trivison | 11. Selebaran | 17. Film/slide |
| 6. Bando jalan | 12. Melekat | 18. Apung |

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun

Wajib Pajak

.....

Nama jelas


C. KOLOM PENELITIAN OLEH PETUGAS DPDPK

| | |
|------------------|---------|
| Diterima tanggal | : |
| Nama Petugas | : |
| NIP. | : |
| | (..... |


----- - Gunting disini -----

| | |
|--|---|
| <p>NPWPD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> | <p>TANDA TERIMA</p> <p>No. SPTPD :</p> <p>Yogyakarta, Tahun</p> <p>Yang Menerima</p> <p>(.....</p> |
|--|---|


E. SPTPD PAJAK PARKIR
E. 1 - BLANGKO

| | | |
|--|--|---|
|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK PARKIR</p> | <p>Nomor :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun :</p> |
| | <p>Tanggal diterima DPDPK</p> | |
| <p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baca Petunjuk pengisian 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan atau sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku | | |
| <p>A. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | | |
| B. NAMA WAJIB PAJAK : | | |
| C. NAMA USAHA : | | |
| D. ALAMAT TEMPAT USAHA : | | |
| E. KELURAHAN / KECAMATAN : | | |
| F. TELEPHONE : | | |
| G. PERUBAHAN IDENTITAS : ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu) | | |
| <p>H. DASAR PENGENAAN PAJAK (Coret yang tidak perlu)</p> | <p>OMZET JASA</p> | <p>JUMLAH (Rp)</p> |
| | 1. Tempat Parkir : | |
| | 2. Garasi Kendaraan Bermotor : | |
| 3. Jumlah total : | | |
| I. PAJAK TERUTANG | Tarif Pajak 20 % | |
| J. KREDIT PAJAK | | |
| K. JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR | (lajur huruf I – huruf J) | |
| L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK / KUASANYA | <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya</p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta ,..... (.....)</p> | |
| M. PEMBETULAN IDENTITAS : | | |
| 1. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| 2. NAMA WAJIB PAJAK : | | |
| 3. NAMA USAHA : | | |
| 4. ALAMAT TEMPAT USAHA : | | |
| 5. KELURAHAN / KECAMATAN : | | |
| 6. TELEPHONE : | | |
| <p>PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :</p> <p>Kolom A : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom B : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom C : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom D : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom E : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom F : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom G : Diisikan apabila ada perubahan data Wajib Pajak</p> <p>Kolom H : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan</p> <p>Kolom I : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 20 % (dua puluh persen)</p> <p>Kolom J : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir</p> <p>Kolom K : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak</p> <p>Kolom L : Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya</p> <p>Kolom M : Diisikan apabila ada perubahan</p> | | |
| <p>No SPTPD :</p> <p>TANDA TERIMA</p> | | |
| <p>NPWPD : NAMA : USAHA : ALAMAT USAHA :</p> | | |
| | | <p>Yogyakarta,</p> <p>Yang Menerima</p> <p>.....</p> |


E. 2 – LAMPIRAN BLANGKO

| | | | | |
|--|--|---|------------|------------|
|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PARKIR</p> | <p>Nomor : Masa Pajak : Tahun :</p> <p style="text-align: center;">Tanggal diterima DPDPK </p> | | |
| 1 DATA OBYEK PAJAK | | | | |
| a. Jenis Obyek | : Tempat Parkir / Garasi Kendaraan Bermotor | | | |
| b. Luas lahan | : meter 2 | | | |
| a. Jam buka / jam tutup | : Pukul s.d ; atau selama : jam | | | |
| No. | Jenis Kendaraan | Kapasitas kendaraan yang dapat diparkir | Tarif (Rp) | Keterangan |
| | | | | |
| Extra Jam | | | | |
| Jumlah | | | | |
| 2. REKAPITULASI PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR | | | | |
| Tanggal | Tarif (Rp) | Nomor Tanda Parkir | Jumlah | Omzet Jasa |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jumlah total | | | | |
| Yogyakarta, (.....) | | | | |

F. SPTPD PAJAK PENERANGAN JALAN
F. 1 - BLANGKO

| | | |
|--|---|---|
|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK PENERANGAN JALAN</p> | <p>Nomor :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun :</p> <p style="text-align: center;">Tanggal diterima DPDPK</p> |
| <p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baca Petunjuk pengisian 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan atau sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku | | |
| <p>A. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | | |
| B. NAMA WAJIB PAJAK : | | |
| C. NAMA USAHA : | | |
| D. ALAMAT TEMPAT USAHA : | | |
| E. KELURAHAN / KECAMATAN : | | |
| F. TELEPHONE : | | |
| G. KELURAHAN/KECAMATAN : | | |
| | OMSET PENJUALAN DAYA LISTRIK | JUMLAH (Rp.) |
| H. DASAR PENGENAAN PAJAK | 1. Golongan Rumah Tangga | |
| | 2. Golongan industri | |
| | 3. Lain-lain | |
| I. PAJAK TERUTANG | Tarif Pajak : (1) 8 % | |
| | (2) 3 % | |
| J. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR | | |
| K. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR | (Lajur I – J) | |
| | | |
| B. PERNYATAAN | | |
| <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta,, Tahun</p> <p style="text-align: right;">Wajib Pajak Nama jelas</p> | | |
| PETUNJUK PENGISIAN SPTPD : | | |
| Kolom A | : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD | |
| Kolom B | : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD | |
| Kolom C | : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD | |
| Kolom D | : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD | |
| Kolom E | : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD | |
| Kolom F | : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD | |
| Kolom G | : Diisikan sesuai dengan wilayah tempat obyek berada | |
| Kolom H | : Diisikan sesuai dengan Golongan obyek pajak | |
| Kolom I | : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 8 % (delapan persen) atau 3% (tiga persen) | |
| Kolom J | : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir | |
| Kolom K | : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak | |
| No SPTPD : | | |
| TANDA TERIMA | | |
| NPWPD | : | |
| NAMA | : | |
| USAHA | : | |
| ALAMAT USAHA | : | |
| | Yogyakarta, | |
| | Yang Menerima | |

F. 2 - LAMPIRAN BLANGKO

| | | |
|---|--|---|
|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> | <p>Nomor : Masa Pajak : Tahun :</p> |
| | <p>PAJAK PAJAK PENERANGAN JALAN</p> | <p>Tanggal diterima DPDPK</p> |

NPWPD


:

| NO. | GOL. TARIF PLN | BATAS DAYA | JUMLAH PELANGGAN | BIAYA BEBAN | BIAYA PEMAKAIAN DAYA | KET. |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|------|
| 1. | S – 1 / TR | 220 VA | | | | |
| | S – 2 / TR | 450 VA | | | | |
| | S – 2 / TR | 900 VA | | | | |
| | S – 2 / TR | 1300 VA | | | | |
| | S – 2 / TR | 2200 VA | | | | |
| | S – 2 / TR | > 2200 VA | | | | |
| | | | s.d 200 KVA | | | |
| 2. | S – 3 / TM | > 200 KVA | | | | |
| | R – 1 / TR | s.d 450 VA | | | | |
| | R – 1 / TR | 900 VA | | | | |
| | R – 1 / TR | 1300 VA | | | | |
| | R – 1 / TR | 2200 VA | | | | |
| | R – 2 / TR | > 2200 VA – 6600 VA | | | | |
| | R – 3 / TR | > 6600 VA | | | | |
| 3. | B – 1 / TR | s.d 450 VA | | | | |
| | B – 1 / TR | 900 VA | | | | |
| | B – 1 / TR | 1300 VA | | | | |
| | B – 1 / TR | 2200 VA | | | | |
| | B – 2 / TR | > 2200 VA – 200 KVA | | | | |
| 4. | B – 3 / TM | > 200 KVA | | | | |
| | I – 1 / TR | s.d 450 VA | | | | |
| | I – 1 / TR | 900 VA | | | | |
| | I – 1 / TR | 1300 VA | | | | |
| | I – 1 / TR | 2200 VA | | | | |
| | I – 1 / TR | > 2200 VA – 14 KVA | | | | |
| | I – 2 / TR | > 14 KVA – 200 KVA | | | | |
| 5. | I – 3 / TM | > 200 KVA | | | | |
| | I – 4 / TT | > 30000 KVA | | | | |
| | P – 1 / TR | s.d 450 VA | | | | |
| | P – 1 / TR | 900 VA | | | | |
| | P – 1 / TR | 1300 VA | | | | |
| | P – 1 / TR | 2200 VA | | | | |
| 6. | P – 1 / TR | > 2200 VA – 200 KVA | | | | |
| | P – 2 / TR | > 200 KVA | | | | |
| | P – 3 / TR | 0 | | | | |
| | 1 - M | 0 | | | | |
| | 1 - T / TR | > 200 KVA | | | | |
| | 1 - C / TM | > 200 KVA | | | | |

Yogyakarta,

(.....)

G. SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET
G. 1 - BLANGKO

| | | |
|--|--|---|
|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK SARANG BURUNG WALET</p> | <p>Nomor :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun :</p> <hr/> <p>Tanggal diterima DPDPK</p> |
|--|--|---|

PERHATIAN

1. Baca Petunjuk pengisian
2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan atau sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku

A. NPWPD :

B. NAMA WAJIB PAJAK :

C. NAMA USAHA :

D. ALAMAT TEMPAT USAHA :

E. KELURAHAN / KECAMATAN :

F. TELEPHONE :

G. KELURAHAN/KECAMATAN :

| | OMSET PENJUALAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| H. DASAR PENGENAAN PAJAK | 1. Sarang Burung Walet | |
| | 2. Sarang Burung sejenisnya | |
| | Jumlah total | |
| I. PAJAK TERUTANG | Tarif Pajak : 10 % | |
| J. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR | | |
| K. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR | (Lajur I – J) | |

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Yogyakarta,, Tahun
.....
Wajib Pajak
.....
Nama jelas

- PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :**
- Kolom A : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
 - Kolom B : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
 - Kolom C : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
 - Kolom D : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
 - Kolom E : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
 - Kolom F : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
 - Kolom G : Diisikan sesuai dengan wilayah tempat obyek berada
 - Kolom H : Diisikan sesuai dengan Golongan obyek pajak
 - Kolom I : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 8 % (delapan persen) atau 3% (tiga persen)
 - Kolom J : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
 - Kolom K : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak

No SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :

NAMA :

USAHA :

ALAMAT USAHA :

Yogyakarta,
Yang Menerima
.....

G. 2 - LAMPIRAN BLANGKO

|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET</p> | <p>Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima DPDPK </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|------------|---------------|-------|------------|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
| <p>A. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>B. Akta dan Perijinan</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>- Ijin Usaha / HO : Nomor : tanggal</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Berlaku sampai dengan :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dikeluarkan oleh :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>C. Kapasitas</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">LUAS USAHA</th> <th style="width: 25%;">JUMLAH SARANG</th> <th style="width: 20%;">OMSET</th> <th style="width: 25%;">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | No | LUAS USAHA | JUMLAH SARANG | OMSET | KETERANGAN | 1. | | | | | 2. | | | | | 3. | | | | | 4. | | | | | 5. | | | | | 6. | | | | |
| No | LUAS USAHA | JUMLAH SARANG | OMSET | KETERANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>D. Harga penjualan : Rp.ons/kg</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>E. Masa panen :kali dalam 1 tahun</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Yogyakarta, (.....)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 51 TAHUN 2011


TANGGAL : 30 Juni 2011

BENTUK DAN ISI SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD


A. FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

| | | | |
|---|---|---|-------------------|
|  | PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835 | SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan : | No. SSPD |
| NPWPD : Nama : Alamat : Berdasarkan :Tahun : Bulan : Tanggal :Nomor : | | | |
| No | Ayat | Jenis Pajak | Jumlah |
| | | | |
| | | | Rp. |
| Dengan huruf | | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div> | |
| Yogyakarta, Penyetor (.....) | Diterima Tanggal : Petugas Tempat Pembayaran Tanda tangan (Nama terang) NIP. | Ruangan untuk Teraan Kas Register/Tanda tangan Petugas Penerima | |

B. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
|  | PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835 | SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) | No. SSPD |
| Masa Pajak : Tahun : | | | |
| Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal jatuh tempo : | | | |
| No | Ayat | Jenis Pajak Daerah | Jumlah Rp. |
| | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak | |
| | | Jumlah Sanksi : a. Bunga | |
| | | b. Kenaikan | |
| | | Jumlah Keseluruhan | |
| Dengan huruf | | | |
| PERHATIAN : | | | |
| 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah | | | |
| 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan dibayar | | | |
| Yogyakarta tahun a.n. Kepala Dinas Kepala Seksi Penetapan NIP. | | | |
| TANDA TERIMA | | No. SKPD | |
| NPWPD Nama Alamat | | Yogyakarta, Tahun .. Yang Menerima , (.....) | |


C. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

| | | | | |
|--|---|----------------------|------------|------------------|
|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p> <p>Tahun :</p> <p>Bulan :</p> | <p>No.</p> | | |
| <p>NPWPD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p> | | | | |
| <p>H. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p> | | | | |
| Pemeriksaan | Sanksi | | Penyetoran | Kekurangan Setor |
| Pajak (Rp) | Bunga (Rp) | Denda (Rp.) | Rp. | Rp. |
| | | | | |
| | | | | |
| Jumlah pembayaran | | | | |
| Dengan huruf | | | | |
| <p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Apabila SKPD ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan dibayar | | | | |
| <p>Yogyakarta..... tahun</p> <p>a.n. Kepala Dinas Kepala Seksi Penetapan</p> <p>.....</p> <p>NIP</p> | | | | |
| <p>NPWPD Nama Alamat</p> | <p>TANDA TERIMA</p> | | | <p>No. SKPD</p> |
| <p>Yogyakarta, Tahun ..</p> <p>Yang Menerima ,</p> <p>(.....)</p> | | | | |

D. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)</p> <p>Tahun : Bulan :</p> | <p>No.....</p> | | |
| <p>NPWPD : Nama : Alamat : Tanggal jatuh tempo :</p> <p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : Masa Pajak :</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p> | | | | |
| Pemeriksaan Pajak (Rp) | Sanksi Bunga (Rp) | Denda (Rp.) | Penyetoran Rp. | Kekurangan Setor Rp. |
| | | | | |
| Jumlah pembayaran | | | | |
| Dengan huruf | | <div style="border: 1px solid black; width: 500px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> | | |
| <p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah</p> <p>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan dibayar</p> | | | | |
| <p>Yogyakarta tahun a.n. Kepala Dinas Kepala Seksi Penetapan _____ NIP</p> | | | | |
| <p>NPWPD Nama Alamat</p> | <p>TANDA TERIMA</p> | | <p>No. SKPD</p> <p>Yogyakarta,Tahun .. Yang Menerima , (.....)</p> | |

E. FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, L ansung 548519 dan 562835</p> | <p>STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p> | Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima DPDPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|---------|--------|-----------|---|---|------------------|--|--|--------|-----------|---------|---------------|-------|---------|---------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. NAMA : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. ALAMAT : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : Tanggal Jatuh tempo : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi Bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ketetapan Pajak</th> <th colspan="3">Penyetoran</th> <th>Sanksi</th> <th>Penagihan</th> </tr> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Tanggal batas</th> <th>Pajak</th> <th>Tanggal</th> <th>Setoran</th> <th>Bunga</th> <th>Tagihan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | Ketetapan Pajak | | Penyetoran | | | Sanksi | Penagihan | Tanggal | Tanggal batas | Pajak | Tanggal | Setoran | Bunga | Tagihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ketetapan Pajak | | Penyetoran | | | Sanksi | Penagihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal | Tanggal batas | Pajak | Tanggal | Setoran | Bunga | Tagihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dengan huruf <input style="width:500px; height:20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yogyakarta,,..... a.n. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan NIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Gunting disini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%; vertical-align: top;"> NPWPD : Nama : Alamat : </td> <td style="width:40%; text-align: center; vertical-align: top;"> TANDA TERIMA Yogyakarta,,..... Yang menerima (Nama jelas) </td> <td style="width:30%; text-align: right; vertical-align: top;"> Nomor STPD </td> </tr> </table> | | | | | | | NPWPD : Nama : Alamat : | TANDA TERIMA Yogyakarta,,..... Yang menerima (Nama jelas) | Nomor STPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPWPD : Nama : Alamat : | TANDA TERIMA Yogyakarta,,..... Yang menerima (Nama jelas) | Nomor STPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

WALIKOTA YOGYAKARTA,
 ttd
 H. HERRY ZUDIANTO

CONTOH BENTUK SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

|  <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p> | <p>SURAT PERJANJIAN ANGSURAN</p> | <p>Nomor :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun :</p> <p style="text-align: center;">Tanggal diterima DPDPK</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|----------|------------|--------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|--|--|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------|------------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------------|------------|-----------|----------|------------------------------|------------|-----------|----------|
| <p>SURAT PERJANJIAN ANGSURAN</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>NPWPD :</p> <p>Alamat :</p> <p>Bertindak dan atas nama :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Dengan ini menyatakan , telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran pajak terutang pada tanggal sebanyak kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">a. SKPD</td> <td style="width: 45%;">No., tgl.....</td> <td style="width: 40%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>b. SKPDKB</td> <td>No., tgl.....</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>c. SKPDKBT</td> <td>No., tgl.....</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>d. STPD</td> <td>No., tgl.....</td> <td><u>Rp.</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> </table> <p>Pembayaran angsuran</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Angsuran Pokok</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Biaya Adm. bunga</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Jumlah angsuran.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Tgl., Angsuran ke I</td> <td style="text-align: center;">Rp. ,</td> <td style="text-align: center;">Rp.,</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>b. Tgl., Angsuran ke II</td> <td style="text-align: center;">Rp. ,</td> <td style="text-align: center;">Rp.,</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>c. Tgl., Angsuran ke III</td> <td style="text-align: center;">Rp. ,</td> <td style="text-align: center;">Rp.,</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>d. Tgl., Angsuran ke IV</td> <td style="text-align: center;">Rp. ,</td> <td style="text-align: center;">Rp.,</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika pernyataan pembayaran di atas tidak dipenuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu</p> <p style="text-align: right;">....., Tahun</p> <p>Mengetahui / Menyetujui Kepala Dinas</p> <p style="text-align: right;">Yang berjanji</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p> | | | a. SKPD | No., tgl..... | Rp. | b. SKPDKB | No., tgl..... | Rp. | c. SKPDKBT | No., tgl..... | Rp. | d. STPD | No., tgl..... | <u>Rp.</u> | | | Rp. | | Angsuran Pokok | Biaya Adm. bunga | Jumlah angsuran. | a. Tgl., Angsuran ke I | Rp. , | Rp., | Rp. | b. Tgl., Angsuran ke II | Rp. , | Rp., | Rp. | c. Tgl., Angsuran ke III | Rp. , | Rp., | Rp. | d. Tgl., Angsuran ke IV | Rp. , | Rp., | Rp. |
| a. SKPD | No., tgl..... | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. SKPDKB | No., tgl..... | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. SKPDKBT | No., tgl..... | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. STPD | No., tgl..... | <u>Rp.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Angsuran Pokok | Biaya Adm. bunga | Jumlah angsuran. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Tgl., Angsuran ke I | Rp. , | Rp., | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Tgl., Angsuran ke II | Rp. , | Rp., | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Tgl., Angsuran ke III | Rp. , | Rp., | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Tgl., Angsuran ke IV | Rp. , | Rp., | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

